

Model Solusi Inovatif Pembiayaan Spesifik Perbankan Pada Agribisnis Komoditi Padi di Sulawesi Selatan

Innovative Solution Model for Banking Specific Financing in Rice Commodity Agribusiness in South Sulawesi

Zulkfli Sjamsir*, Hamzah, Suhartina R

^{*)} Email korespondensi: zulkflisjamsir@unismuh.ac.id

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin NO. 259 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

ABSTRAK

Jejak rekam perjalanan panjang sejarah kredit pertanian di Indonesia dibedakan menjadi (i) Pra-Bimas (1964); (ii) Bimas Nasional dan Gotong Royong (1965-1970); (iii) Bimas Disempurnakan (1970-1984); (iv) Kredit Usaha Tani (1985-1999); (v) Kredit Ketahanan Pangan (2000), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (2007) dan Kredit Usaha Rakyat (2007 sampai sekarang). Namun sampai saat ini tidak ada satupun skim kredit yang konsisten khusus menangani komoditi padi. Dengan demikian, *capacity bulding* petani padi dalam mengadopsi teknologi maju seperti benih bermutu, pupuk berimbang, alsintan pompa air, traktor, *power thresher*, *combined harvester*, dan pengolahan hasil berbasis revolusi industri 4.0 dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk pertanian pangan padi tidak dapat diwujudkan. Tujuan penelitian adalah 1. Mengkaji kendala/hambatan penyaluran skim pembiayaan usaha agribisnis komoditi padi dari sisi lembaga keuangan dan petani usaha agribisnis komoditi padi dan 2. Mendesain model solusi inovatif pembiayaan spesifik perbankan pada usaha agribisnis komoditi padi. Penelitian ini dilaksanakan Agustus sampai Desember 2022, di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Kendala/hambatan dari sisi penyaluran kredit pihak perbankan adalah kebijakan penyaluran kredit yang relatif bersifat sentralistik dan dari sisi petani agribisnis adalah lemahnya sistem administrasi keuangan dan kurangnya jaminan yang *bankable*; dan (2) Model solusi inovatif pembiayaan spesifik perbankan pada agribisnis komoditi padi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah skim Kredit Agribisnis Padi (KAP), yaitu adanya peran serta Pemerintah Daerah sebagai pembina dan koordinatif.

Kata kunci: model inovatif; skim pembiayaan spesifik; perbankan; agribisnis komoditas padi.

ABSTRACT

Traces of the long history of agricultural credit history in Indonesia are divided into: (i) Pre-Bimas (1964); (ii) National Community Guidance and Gotong Royong (1965-1970); (iii) Improved Guidance (1970-1984); (iv) Agricultural Business Credit (1985-1999); (v) Food Security Credit (2000), Food and Energy Security Credit (2007) and People's Business Credit (2007 to present). However, until now there has not been a single consistent credit scheme that specifically deals with rice commodities. Thus, the capacity building of rice farmers in adopting advanced technologies such as quality seeds, balanced fertilizers, water pumping machines, tractors, power threshers, combine crushers, and processing of products based on the industrial revolution 4.0 in order to increase the added value of rice food agricultural products cannot be realized. Research objectives include; 1. Assess the constraints/obstacles in the distribution of rice commodity agribusiness business financing schemes from the perspective of financial institutions and rice commodity agribusiness farmers and 2. Design innovative banking-specific financing solutions models for rice commodity agribusiness businesses. This research was conducted from August to December 2022, in Gowa Regency, South Sulawesi Province. The results of this collaborative research can be stated: (1) Obstacles/obstacles in terms of bank lending are relatively centralized lending policies and from

the agribusiness farmer's side are weak financial administration systems and lack of bankable guarantees; and (2) The model for innovative banking-specific financing solutions for rice commodity agribusiness produced in the research is the Rice Agribusiness Credit Skim (KAP), in which the role of the Regional Government is as Advisor and Coordinator.

Keywords: *innovative models; specific financing schemes; banking; rice commodity agribusiness.*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan sektor agribisnis pertanian pangan sebagai bagian integral pembangunan nasional mempunyai peranan strategis dalam peningkatan PDB, penyediaan pangan, penyediaan bahan baku industri, dan peningkatan ekspor dan devisa negara. Selain itu juga berperan untuk pengentasan kemiskinan, penyediaan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan petani, dan kesejahteraan masyarakat (Faisol, A., 2022). Untuk mewujudkan peranan strategis pembangunan sektor agribisnis, pertanian pangan berkelanjutan tidak terpisahkan dari dukungan aksesibilitas pembiayaan secara menyeluruh.

Saragih (2001) mengatakan bahwa di masa yang akan datang sektor agribisnis Indonesia masih memiliki ruang gerak pengembangan yang cukup luas dan dukungan pasar yang cukup potensial. Prospek sektor agribisnis ini dapat ditelusuri, baik dari sisi penawaran (*supply side*) maupun sisi permintaan (*demand side*). Prospek ekonomi pengembangan sektor agribisnis dari sisi penawaran, di Indonesia memiliki:

- a) Sumber daya dasar agribisnis seperti iklim tropis, keanekaragaman hayati (*biodiversity*), baik yang ada di daratan maupun di perairan.
- b) Sumber daya perikanan berupa sumber daya perairan seluas 5-7 juta km² dan garis pantai 91.000 Km yang terpanjang di dunia.
- c) Komoditas perkebunan dimana beberapa komoditas diperkirakan menjadi produsen terbesar di dunia, diantaranya minyak kelapa (*coconut crude oil*), minyak sawit (*crude palm oil*) karet kakao, teh, dan kopi.
- d) Komoditas peternakan, khususnya ayam ras mempunyai struktur industri hulu ayam ras yang cukup kuat bahkan terkuat di Asia.

Prospek pengembangan sektor agribisnis di Indonesia dari sisi permintaan, dapat dijelaskan:

- a) Konsumsi per kapita produk pangan agribisnis di Indonesia masih tergolong terendah di dunia seperti ikan, sayuran, buah-buahan, daging, susu dan telur, kecuali konsumsi beras yang tertinggi di dunia.
- b) Peluang pasar produk-produk agribisnis di pasar internasional masih sangat besar.
- c) Meningkatnya industrialisasi yang tidak berbasis pertanian (*non-agro based industri*), khususnya di negara-negara yang sempit wilayahnya. (Patiung, 2018).

Walaupun sangat strategis, sektor agribisnis dan pedesaan sering dihadapkan pada banyak permasalahan, terutama lemahnya permodalan. Sebagai unsur esensial dalam meningkatkan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, ketiadaan modal dapat membatasi ruang gerak sektor ini (Ngasifudin, 2017). Jejak rekam perjalanan panjang sejarah kredit pertanian di Indonesia dapat dibedakan menjadi : (i) Periode Pra-Bimas (sampai dengan 1964); (ii) Periode Bimas Nasional dan Gotong Royong (1965-1970); (iii)

Periode Bimas yang Disempurnakan (1970-1984); (iv) Periode Kredit Usaha Tani (KUT) (1985-1999); (v) Periode pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu Kredit Ketahanan Pangan (KKP) 2000, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) 2007 dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) (2007 sampai sekarang). Namun perjalanan panjang sejarah kredit sampai saat ini tidak ada satu pun skim kredit yang konsisten khusus menangani komoditi padi (Zulkifli dkk, 2021).

Sejalan dengan itu, isu kekinian di saat pandemi Covid-19 yang menjadi perbincangan utama dalam mengatasi masalah strategis berskala nasional sebagai titik kritis pembangunan pertanian (*critical point of development*) di nagara berbasis Agraris ini adalah kapan akses petani terhadap kredit khusus komoditi padi bisa dinikmati. Data dan fakta menunjukkan, bahwa penyaluran pembiayaan di sektor pertanian hanya sekitar Rp 149,7 Triliun atau 5,5 % dari total kredit perbankan sebesar Rp 2.721,9 Triliun. Itu pun, Rp 95 Triliun (63,5%) disalurkan di sektor perkebunan, Rp 6,18 Triliun (4,1 %) untuk komoditas padi, Rp3,07 Triliun (2,1 %) pembibitan budidaya sapi potong dan Rp 843 miliar (0,56 %) untuk komoditas hortikultura (Zulkifli, 2019).

Rendahnya alokasi kredit pada sektor pangan padi sekitar Rp 6,18 Triliun (4,1%), karena perbankan tidak membedakan antara sektor pertanian dan non pertanian dalam menerapkan sistem prosedur skim kredit dari aspek (a) suku bunga, (b) pagu kredit, (c) penerima kredit, (d) penyaluran kredit, (e) pengembalian kredit, (f) waktu pengembalian dan (g) jaminan/agunan (Zulkifli, 2019). Dengan demikian, *capacity bulding* petani padi dalam mengadopsi teknologi maju seperti benih bermutu, pupuk berimbang, ataupun pompa air, alsintan traktor, *power thresher combined harvester*, dan alsintan pengolahan hasil berbasis revolusi industri 4.0 dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk pertanian pangan padi tidak dapat diwujudkan.

Menyikapi isu pembiayaan di sektor pangan ini, peneliti telah melakukan beberapa kajian akademik Kajian ini belum menjadi solusi terbaik, sehingga keberadaan Usulan Penelitian Kerjasama dengan Balai Penelitian Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian dengan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menciptakan inovasi dan pengembangan IPTEKS melalui kajian komprehensif terhadap Pengembangan Model Solusi Inovatif Skim Pembiayaan Spesifik Perbankan pada Agribisnis di Sulawesi Selatan guna mendukung kemandirian ketahanan pangan nasional serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku agribisnis

II. METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan dari analisis kausal-komparatif dan studi deskriptif-kuantitatif. Studi kausal-komparatif dilakukan dalam upaya melakukan identifikasi terhadap program pembiayaan petani/pelaku agribisnis tanaman padi di daerah penelitian di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh perbankan daerah.

Untuk menentukan formulasi optimalisasi dan rasionalisasi penentuan tingkat suku bunga penyaluran skim kredit petani/pelaku agribisnis padi dari sisi lembaga keuangan dan dari sisi petani/pelaku usaha agribisnis padi di daerah penelitian Sulawesi Selatan, sepenuhnya mengikuti prinsip FGD dan *indepth interview*.

Penetapan Model Solusi Inovatif Pembiayaan Spesifik Perbankan Pada Agribisnis Komoditi Padi akan dilakukan pendekatan kolaboratif, yaitu:

- 1) Hasil Analisis Kegiatan Survei Pendahuluan (*focus group discussion*), *Pengumpulan Data dan Validasi dan Verifikasi Data* melalui penyebaran kuesioner dengan petani responden di daerah penelitian.
- 2) Kolaborasi Periodisasi kredit pertanian di Indonesia dapat dibedakan menjadi : (i) Periode Pra-Bimas (sampai dengan 1964); (ii) Periode Bimas Nasional dan Gotong Royong (1965-1970); (iii) Periode Bimas yang Disempurnakan (1970-1984); (iv) Periode Kredit Usaha Tani (KUT) (1985-1999); (v) Periode pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu Kredit Ketahanan Pangan (KKP) 2000, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) 2007 dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) (2007 sampai sekarang).
- 3) Ulasan keberadaan alternatif skema penyaluran kredit bagi UMKM menurut bidang usaha yang diperoleh dari lokasi penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kendala/Hambatan Penyaluran Skim Pembiayaan Agribisnis Padi dari Sisi Lembaga Keuangan dan Petani Agribisnis Komoditi Padi

Hasil analisis identifikasi kendala/hambatan penyaluran skema kredit agribisnis padi dari sisi perbankan daerah dan sisi agribisnis komoditi padi di Kabupaten Pangkep, Maros, Gowa, Takalar dan Bantaeng di Sulawesi Selatan, maka dikemukakan beberapa hambatan secara eksternal dan internal diantaranya dari sisi penyaluran kredit pihak perbankan adalah kebijakan penyaluran kredit yang relatif bersifat sentralistik dan dari sisi petani agribisnis adalah lemahnya sistem administrasi keuangan dan kurangnya jaminan yang *bankable* petani di Sulawesi Selatan. Ulasan yang lebih rinci dan komprehensif tentang identifikasi masalah skema penyaluran kredit pada petani agribisnis, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

2. Model Solusi Inovatif Pembiayaan Spesifik Perbankan pada Agribisnis Komoditi Padi

Survei pendahuluan (*focus group discussion*), pengumpulan data, validasi, dan verifikasi data terkait (a) kendala/hambatan penyaluran skim pembiayaan usaha agribisnis komoditi padi dari sisi lembaga keuangan dan petani usaha agribisnis komoditi padi, (b) sistem prosedur penyaluran skim pembiayaan yang diterapkan perbankan pada petani usaha agribisnis komoditi padi, ditabulasi, diinventarisir, diidentifikasi dan dianalisis. Model Solusi Inovatif Pembiayaan Spesifik Perbankan pada Agribisnis Komoditi Padi yaitu skim kredit agribisnis padi (KAP), yaitu keterlibatan dan peran serta pemerintah Daerah berfungsi sebagai Pembina dan Koordinatif. Model solusi inovatif pembiayaan spesifik perbankan pada agribisnis komoditi padi digambarkan pada Gambar 1.

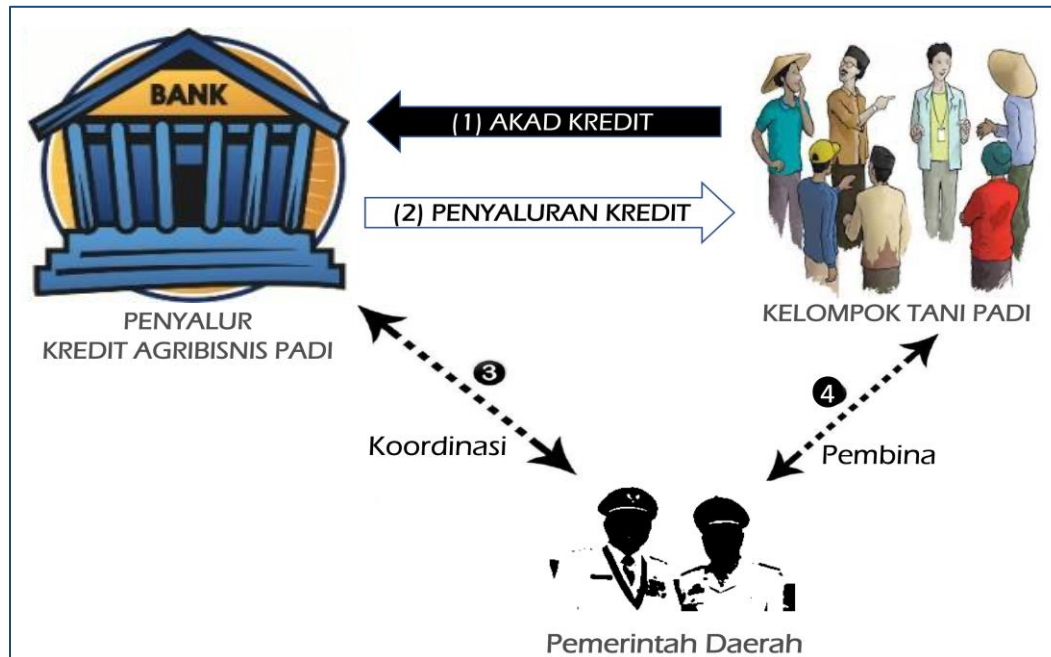
- a) Pengertian Skim Kredit Agribisnis Padi (KAP) adalah merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur petani/Kelompok tani/Gapoktan komoditi padi dan layak namun belum memiliki agunan yang cukup, yang diberikan kepada petani/Kelompok tani/Gapoktan yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster

(George, 2008). Sumber dana penyaluran KAP adalah 100% (seratus persen) bersumber dari dana Penyalur KAP.

Tabel 1. Hasil analisis identifikasi kendala/hambatan penyaluran skema kredit agribisnis padi dari sisi perbankan daerah dan sisi agribisnis komoditi padi di Kabupaten Pangkep, Maros, Gowa, Takalar dan Bantaeng Sulawesi Selatan, 2022.

Isu/Kriteria Evaluasi	Kesimpulan Umum
Lingkungan Eksternal	Kendala/Hambatan Eksternal
Peraturan	1. Perbankan daerah dan Instansi lainnya: (a) peraturan yang ada dipandang sangat sentralistik dan membatasi kewenangan keputusan akad kredit bagi Petani Agribisnis; (b) belum terdapat suatu peraturan yang seragam dan sesuai pula kondisi pengembangan petani agribisnis di daerah masing-masing kabupaten/kota Sulsel. 2. Petani Agribisnis: (a) petani agribisnis belum memahami baik program pengembangan, peraturan dan persyaratan kredit perbankan daerah; (b) berharap peraturan dan persyaratan perolehan kredit lebih dipermudah terutama untuk agunan/jaminan (<i>collateral</i>).
Peluang	1. Perbankan Daerah dan Instansi lainnya: petani agribisnis masih berpeluang memperoleh pembiayaan, meskipun memiliki masalah daya saing usaha yang rendah. 2. Petani Agribisnis: akses usaha terbatas untuk perolehan kredit, pengembangan usaha dan pemasaran.
Komunikasi	1. Perbankan Daerah dan Instansi lainnya: (a) koordinasi antar lembaga terkait masih sangat lemah; (b) diseminasi program dan skim pembiayaan petani agribisnis berjalan terpisah. 2. Petani Agribisnis: akses pusat informasi pengembangan usaha sangat lemah.
Kepentingan	1. Perbankan Daerah dan Instansi lainnya: (a) prioritas pada pengamanan dana tersalur; (b) dana pembinaan petani agribisnis terbatas. 2. Petani Agribisnis: pengembangan usaha terkait dengan teknologi dan kualitas produk.
Lingkungan Internal	Kendala/Hambatan Internal
Proses	1. Perbankan Daerah dan Instansi lainnya: (a) merasa kesulitan dalam pengukuran perkembangan usaha; (b) administrasi usaha lemah (administrasi keuangan). 2. Petani Agribisnis: sulit memenuhi sistem dan persyaratan administrasi sesuai standar perbankan, terutama masalah laporan keuangan dan jaminan.
Kapasitas	1. Perbankan Daerah dan Instansi lainnya: (a) kapasitas petani agribisnis terbatas; (b) akses dan pemanfaatan atas ketersediaan kredit petani agribisnis pada perbankan daerah belum optimal. 2. Petani Agribisnis: merasa sulit memenuhi persyaratan jaminan dan memahami bahwa kapasitas produksi terbatas.
Jaminan	1. Perbankan Daerah dan Instansi lainnya: (a) masalah utama petani agribisnis dalam perolehan kredit adalah ketersediaan jaminan; (b) Perlu penyempurnaan sistem penjaminan kredit. 2. Petani Agribisnis: (a) menyadari belum memiliki aset yang cukup dan layak menjadi jaminan perbankan; (b) menganggap jaminan sebagai faktor penghambat utama.
Kondisi Ekonomi	1. Perbankan Daerah dan Instansi lainnya: memahami bahwa kinerja petani agribisnis juga terkait dengan kondisi makroekonomi. 2. Petani Agribisnis: kinerja usaha sangat ditentukan kondisi harga produk.
Modal	1. Perbankan Daerah dan Instansi lainnya: memandang petani agribisnis sering memanfaatkan modal tidak sesuai peruntukannya. 2. Petani Agribisnis: (a) menyadari modal usaha sangat terbatas; (b) selalu terkendala pada pemilikan aset/modal yang tidak cukup untuk jaminan.
Karakter	1. Perbankan Daerah dan Instansi lainnya: (a) petani agribisnis belum memiliki <i>core</i> bisnis yang tetap; (b) belum memiliki pilihan bidang usaha yang tetap, sehingga sering berpindah usaha. 2. Petani Agribisnis: menyadari berusaha perlu mengikuti perubahan pola bisnis, peluang, iklim dan sebagainya, namun tanpa pertimbangan kelayakan usaha yang matang.

Sumber: Analisis hasil *indepth-interview*, 2022.



Gambar 1. Model solusi inovatif pembiayaan spesifik perbankan pada agribisnis komoditi padi.

- b) Tujuan skim kredit KAP adalah :
- a) Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif petani/kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan)
 - b) Meningkatkan kapasitas daya saing usaha produktif petani/kelompok, gabungan kelompok tani (Gapoktan),
 - c) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,
 - d) Memberikan acuan bagi pemangku kepentingan baik pusat dan daerah dalam penyaluran KAP, dan
 - e) Mendukung program-program Kementerian Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).
- c) Sasaran skim kredit KAP adalah terlaksananya penyaluran KAP sektor pertanian khususnya program peningkatan produktivitas komoditi padi.
- d) Usaha yang dibiayai KAP akan membiayai kegiatan usaha petani/Kelompok tani/Gapoktan terkait dengan teknis pengelolaan usaha tani berorientasi agribisnis sebagaimana dijelaskan berikut.
- 1) Sub Sistem Hulu, meliputi:
 - (a) Pengadaan/perdagangan sarana produksi, berupa pupuk, pestisida, pengadaan benih, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian dan;
 - (b) Pengadaan alsintan pra panen, berupa traktor, pompa air, bajak, luku, pacul, mesin pembibitan (*seedler*), alat tanam biji-bijian (*seeder*), pencacah rumput (*chopper*).
 - (c) dan lain-lain.
 - 2) Sub Sistem Onfarm, meliputi:
 - (a) Budidaya komoditi padi, tenaga kerja;
 - (b) dan lain-lain.
 - 3) Sub Sistem Hilir, meliputi:
 - (a) Pembiayaan alat mesin pascapanen, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, antara lain: *combine harvester*, *thresher*, *corn sheller*, *rice milling unit*, *sabit*,

dryer, mesin penyang padi bermotor, alat tanam biji-bijian, mesin panen dan mesin perontok polong;

- (b) Pembiayaan alat mesin pascapanen dan pengolahan hasil komoditi padi;
- (c) dan lain-lain.

Peruntukan pembiayaan ini dalam rangka peningkatan produktivitas padi dan pendapatan serta kesejahteraan petani dan keluarganya dan inilah yang merupakan keunggulan spesifik Kredit Agribisnis Padi (KAP) dibandingkan dengan skim kredit lainnya.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian kerjasama ini dapat dikemukakan, yaitu (1) Kendala/hambatan dari sisi penyaluran kredit pihak perbankan adalah kebijakan penyaluran kredit yang relatif bersifat sentralistik dan dari sisi petani agribisnis adalah lemahnya sistem administrasi keuangan dan kurangnya jaminan yang *bankable*; dan (2) Model solusi inovatif pembiayaan spesifik perbankan pada agribisnis komoditi padi yang dihasilkan dalam penelitian adalah skim kredit agribisnis padi (KAP), dimana peran serta Pemerintah Daerah sebagai Pembina dan Koordinatif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih banyak diucapkan kepada Skema Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) Universitas Muhammadiyah Makassar karena telah mendanai pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

VI. REFERENSI

- Faisol, A. 2022. *Analisis Potensi Ekonomi Komoditas Padi, Jagung, Bawang Merah, Dan Cabai Di Kabupaten Mojokerto* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).
- George, 2008. Peran Perbankan Nasional Dalam Pembiayaan Sektor Agribisnis. Kompas. <https://www.kompasiana.com/ayufadillah02/62a4cd96fca4e441f90ea5a2/peran-perbankan-nasional-dalam-pembiayaan-sektor-agribisnis>.
- Kadarsan, H. W. 1992. *Keuangan Pertanian dan Pembiayaan Perusahaan Agribisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kloeppinger-Todd, R. and M. Sharma. 2010. Innovations in Rural and Agriculture Finance, Overview. For Food, Agriculture, And The Environment Focus 18 Briefl. July 2010.
- Ngasifudin, M. 2017. Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 6(1), 38-44.
- Patiung, Markus. 2018. Strategi Industrialisasi Pertanian dalam Bentuk Pembangunan Agribisnis Merupakan Solusi Mensejahterakan Rakyat. *Prosiding 2018, Badan Penerbitan Fakultas Pertanian UB*, 201-205.
- Rencana Strategis Kementerian Pertanian. 2022. Kementerian Pertanian-Pusat Pembiayaan Pertanian, 2022-2024.

-
- Saragih, B. 2001. *Agribisnis, Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi. Berbasis Pertanian (Kumpulan Pemikiran)*. Bogor: Yayasan. Persada Mulia Indonesia.
- Zulkifli, Sri Mardiyati, Hamzah, Abubakar Idhan, Suhartina. 2021. *Design Innovative Solution Model for Banking Specific Financing in Rice Commodity Agribusiness in South Sulawesi*. Jurnal Galung Tropika Volume: 10 Nomor: 3 e-ISSN: 2407-6279. [jurnal pertanian umpar.com/index.php/jgt/article/view/897](http://jurnal.pertanian umpar.com/index.php/jgt/article/view/897).
- Zulkifli. 2013. Pengembangan Model Skim Pembiayaan Perbankan pada Sektor Agribisnis Unggulan Sulawesi Selatan (Stranas 2013), Laporan Penelitian Stranas sponsor DP2M-Dikti Kemendikbud.